



**LAPORAN PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI SELATAN  
TRIWULAN I TAHUN 2019**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Kantor Wilayah Sulawesi Selatan merupakan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Hukum dan HAM yang mengemban tugas di bidang pembangunan Hukum dituntut untuk mampu mengadakan pembaharuan dibidang Hukum, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengemban amanah tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan membangun kerjasama dan koordinasi secara Internal dan Eksternal di bidang Pemasarakatan, di bidang Keimigrasian, di bidang Administrasi Hukum umum, dan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dan di bidang Hukum lainnya.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan terwujudnya pelayanan dan kepastian hukum sesuai dengan slogan PASTI REWAKI. Dimana Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, merupakan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Responsif (mewakili bidang AHU), Empati (mewakili bidang HAM), Wibawa (mewakili bidang Keimigrasian), Aktif (mewakili bidang Pemasarakatan), Komunikatif (mewakili bidang Administrasi), dan Implementatif (mewakili bidang Hukum) merupakan Motto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Tuntutan pelayanan di bidang Hukum yang baik tersebut memerlukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan didukung dengan sarana dan prasarana, serta ketersediaan Anggaran yang memadai, sehingga diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.



**I. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS**

**A. Divisi Administrasi**

**1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat**

**Subbagian Program dan Pelaporan**

Berikut kegiatan yang dilaksanakan Subbagian Program dan Pelaporan selama Triwulan I Tahun 2019:

**Tabel 1 Kegiatan Penyusunan Program**

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran	25-27 Februari 2019

**Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi**

**Tabel 2 Kegiatan Peliputan**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Kepala Divisi Pemasaryakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel pimpin Apel Perdana di Lapas Kelas I Makassar.	2 Januari 2019
2.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada kegiatan Remisi Akhir Tahun berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara sementara di Aula Lapas Kelas I Makassar	3 Januari 2019
3.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan Tatap muka dengan 11 orang Taruna dan Taruni Poltekip Pemasaryakatan di Aula Lapas Kelas I Makassar	3 Januari 2019
4.	Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 yang bertemakan "Kemenkum HAM Kolaborasi Berkinerja" di Aula Kanwil	3 Januari 2019
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memimpin Apel Pagi dan memberi pengarahan Meningkatkan Fokus Kinerja dan Kolaborasi Internal di halaman Kanwil	7 Januari 2019
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan didampingi ndengan para Kepala Divisi menerima kunjungan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigjen Pol Adnas, diruang kerja Kakanwil	7 Januari 2019
7.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memimpin Rapat Internal Lingkup Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	7 Januari 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
8.	Kunjungan Ka. Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi mengunjungi Pengadilan Tinggi Sulselbar yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sul Sel Bar, H. Sunaryo di ruang kerjanya, terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jajaran Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel.	7 Januari 2019
9.	Kunjungan Ka. Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi mengunjungi Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sul Sel yang diterima langsung oleh Kepala BNNP Sul Sel, Brigjen Pol Idris Kadir di ruang kerjanya terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jajaran Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel.	7 Januari 2019
10.	Ka. Sub Reformasi Birokrasi, Humas dan TI Kemenkum Ham Sul Sel, mengunjungi POLDA Sul Sel di ruang kerjanya terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jajaran Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel.	8 Januari 2019
11.	Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulsel menyelenggarakan Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (Sisumaker) di Aula Kanwil oleh Fasilitator Achmad Mile	8 Januari 2019
12.	Perkuat Kolaborasi HAM Eksternal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berencana melakukan pertemuan dengan Kepala BNNP Prov Sulsel	11 Januari 2019
13.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan dan Ka. Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel menerima kunjungan rombongan media fajar di ruang kerja Ka. Bag PP Kanwil	11 Januari 2019
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membuka Seminar Bimbingan Kemasyarakatan di Hotel Demelia Makassar	11 Januari 2019
15.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membuka arisan dharma wanita persatuan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel di Aula	11 Januari 2019
16.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham HAM Sulsel melakukan Monitoring di Rutsn Klas I Makassar	11 Januari 2019
17.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pimpin Rapat terkait dengan Pelaksanaan Hari Bhakti Imgrasi di ruang rapat Ka. Kanwil	12 Januari 2019
18.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pimpin Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2019 dan Penandatanganan Pakta Integritas di seluruh jajaran Ka. UPT di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	14 Januari 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
19.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membuka dan memberikan arahan Sosialisasi Pemanfaatan dan Optimalisasi penggunaan sisumaker Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	14 Januari 2019
20.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membuka Kegiatan Rekonsiliasi tingkat wilayah laporan keuangan dan barang milik negara semester II dan tahunan tahun 2019 di Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	14 Januari 2019
21.	Kakanwil Kemenkumham Sulsel melakukan penyerahan DIPA kepada masing-masing Divisi Kemenkum HAM Sulsel	14 Januari 2019
22.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke BNNP Sul Sel yang di terima langsung oleh Kepala BNNP, Idris Kadir di ruang kerjanya	15 Januari 2019
23.	Penyegar luasan informasi Jaringan Kanwil Kemenkum HAM Sulsel menerima kunjungan awak media dari Sindo News di Lapas Kelas I Makassar	15 Januari 2019
24.	Arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel dalam rapat Internal bahwa apel pagi dan sore merupakan kewajiban semua ASN Kemenkum HAM Sulsel.	15 Januari 2019
25.	Ka. Sub Reformasi Birokrasi, Humas dan TI Kemenkum HAM Sul Sel, mengunjungi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar di ruang kerjanya terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jaringan Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel.	16 Januari 2019
26.	Warga Binaan Pemasarakatan Rutan Kelas I Makassar mengikuti perekaman E-KTP yang di selenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu) di Aula Rutan Kelas I Makassar	17 Januari 2019
27.	Pertandingan Tennis meja dalam rangka Peringati Hari Bhakti Imigrasi, bertempat di Aula Lapas Makassar.	18 Januari 2019
28.	Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel mengadakan Gerak Jalan Santai pada Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-69 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel	20 Januari 2019
29.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melantik Pejabat Fungsional Pembimbing Masyarakat, Analisis Keimigrasian, Penyuluh Hukum, Perancang Perundang-Undangan dan Asisten Masyarakat di Lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	21 Januari 2019
30.	Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel hadir di Kompas TV Makassar.	21 Januari 2019
31.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menerima Kunjungan Rombongan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar terkait dengan Pembentukan Forum Restoratif Justice (RJ) antarInstitusi Penegak Hukum di ruang rapat Kakanwil	21 Januari 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
32.	Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum Ham Sul Sel melaksanakan anjangsana ke Panti Asuhan yang ada di kota Makassar	21 Januari 2019
33.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pimpin Rapat Tarja Kemenkum HAM Sul Sel Tahun 2019 diruang rapat Ka. Kanwil	1 Februari 2019
34.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pimpin serah terma jabatan Plt. Kepala Bapas Kelas II Watampone, Abd. Waris dari Pejabat lama Fungsional Pembimbing Masyarakat di Aula Kanwil	1 Februari 2019
35.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ikuti Pengambilan Sumpah Jabatan PNS T.A. 2017 melalui Media Teleconference di aula Kanwil	1 Februari 2019
36.	Kepala Divisi Masyarakat Kemenkum HAM Sul Sel melakukan Inspeksi Mendadak di Lapas Kelas I Makassar	3 Februari 2019
37.	Kepala Divisi Masyarakat Kemenkum HAM Sul Sel membuka Kegiatan Orientasi CPNS Kemenkum HAM Sul Sel Tahun 2019	4 Februari 2019
38.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Masyarakat Kemenkum HAM Sul Sel untuk menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Masyarakat Nomor PAS-126.PK.02.10.01 Tahun 2019	4 Februari 2019
39.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel membuka Rakor Pelayanan Penerbitan Paspor Calon Jamaah Haji Tahun 1440H/2019M di Hotel Claro Makassar	6 Februari 2019
40.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel beri Materi Penguatan Tusi terhadap CPNS T.A 2018	6 Februari 2019
41.	Kanwil Kemenkumham Sulsel terima Tim Evaluasi PMPRB terhitung tanggal 4 s.d 8 Maret 2019.	6 Februari 2019
42.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel menghadiri Pembukaan Rakor Teknis dalam rangka Peningkatan Daerah Peduli HAM Tahun 2018 di Hotel Aryaduta	7 Februari 2019
43.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel beri Pembekalan dan Persiapan Pelaksanaan Studi Banding diikuti oleh seluruh UPT Kemenkum HAM Sul Sel yang dilaksanakan tgl 7 Februari 2019	7 Februari 2019
44.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum didampingi Ka. Bid Hukum bersama Ka. Sub. Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah pimpin Rapat Internal Fasilitas Harmonisasi Perancang Perda Kabupaten Bantaeng bersama Perancang Peraturan Perundang-Undangan di ruang rapat pimpinan Ka. Kanwil	8 Februari 2019
45.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel pimpin Penutupan Kegiatan Orientasi CPNS Tahap I di Lapas Kelas I Makassar	11 Februari 2019
46.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel pimpin Apel Pagi terkait Komitmen mengikuti Apel dan Pelaksanaan Kegiatan yang ada di RKAKL harus segera dilaksanakan bertempat Halaman Ka. Kanwil	11 Februari 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
47.	Kepala Divisi Administrasi pimpin Rapat Internalisasi Pencegahan TKI Non-prosedural bertempat di Aula Kanwil	12 Februari 2019
48.	ASN Kemenkumham Sulsel ikuti Workshop Penggunaan Aplikasi CBHRIS dan E-learning di Aula Kanwil	12 Februari 2019
49.	Kepala Bidang Hukum Kemenkum HAM Sul Sel gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Kabupaten Bantaeng	12 Februari 2019
50.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel hadir Rakornas Kesbangpol Pemantapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar	12 Februari 2019
51.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel beri Pengarahan pada Kegiatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapas Kelas I Makassar	13 Februari 2019
52.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel bersama para Kepala Divisi perkuat Kolaborasi Eksternal kunjungi Dinas Dukcapil Prov Sul Sel terkait Perekaman KTP Elektronik di Lingkup Lapas	13 Februari 2019
53.	Kabag Program dan Humas serta Kasubag Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkumham Sulsel mengikuti kegiatan Supervisi PMPRB yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemenkum HAM RI.	13 Februari 2019
54.	Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel bekerjasama dengan Ikatan Pegiat Peradilan Semu Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Makassar menyelenggarakan Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum dengan Tema Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Kabupaten Takalar	14 Februari 2019
55.	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kanwil Sul Sel ikuti Rakor Persiapan Penetapan DPTb dan DPK Pemilu 2019 di Hotel Four Points Makassar	14 Februari 2019
56.	Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Sulsel Bpk. Marasidin Siregar melakukan Kunjungan dan memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di Rutan Kelas IIB Barru dan Lapas Khusus Anak Pare-pare.	14 Februari 2019
57.	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel menyelenggarakan Pertemuan Arisan Rutin di Aula Makassar	15 Februari 2019
58.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel melaksanakan promosi terbuka (Open Bidding) penempatan pejabat eselon V di Jajaran Pemasarakatan dan Keimigrasian di Aula Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	18 Februari 2019
59.	Pengumpulan Data Lapangan, Tim Peneliti Valitbang HAM wawancara KaUPT jajaran Kanwil Sulsel	18 Februari 2019
60.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel terima Kunjungan Tim peneliti dari Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM terkait dengan Pola Penempatan Auditor dalam rangka Penguatan Pengawasan di ruang kerja Ka. Kanwil	18 Februari 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
61.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulsel, Imam Suyudi bersama dengan Kepala Divisi Imigrasi dan Kakanim se-Sulsel bertolak ke Kanwil Jawa Timur tepatnya di Kanim kelas II Blitar guna melakukan studi tiru untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di jajaran Imigrasi Kanwil Sulsel yang terus menguat.	19 Februari 2019
62.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sul Sel buka Rakor Pembinaan dan Pembimbingan Anak berhadapan dengan Hukum di Hotel Continent Makassar	19 Februari 2019
63.	Direktur Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Masyarakat Kemenkum HAM RI, Yunaedi beri Pengarahan kepada para Kepala UPT Masyarakat Lingkup Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	19 Februari 2019
64.	Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Perawatan, Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan ikuti Rapat terkait Persiapan Pemilu dengan Disdukcapil Kejaksaan dan KPU di ruang rapat Disdukcapil Provinsi SulSel	19 Februari 2019
65.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Ham Sulsel Imam Suyudi akan memimpin jajaran Imigrasi untuk melakukan Studi Tiru Ke Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar terhitung mulai tanggal 19 s.d 22 Februari 2019.	19 Februari 2019
66.	Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel mengadakan rapat Pembentukan Database Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Pare-Pare.	20 Februari 2019
67.	Kepala Divisi Masyarakat Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel memimpin Sidak di Rutan Kelas I Makassar	20 Februari 2019
68.	Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel gelar rapat Internal bahas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi di Aula Kanwil	20 Februari 2019
69.	Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undang Kabupaten Wajo	20 Februari 2019
70.	DPRD Kabupaten Luwu Utara melakukan Konsultasi Rancangan Peraturan daerah di Kanwil Kemenkum HAM Sulsel	21 Februari 2019
71.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly melantik 18 orang Pimpinan Tinggi Pratama di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal	22 Februari 2019
72.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel membuka Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020	25 Februari 2019
73.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel lantik Pejabat Administrasi Lingkup Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	25 Februari 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
74.	Inspektur Jenderal Kemenkum HAM Riberi Pengarahan pada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Operator RKA-KL jajaran Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	26 Februari 2019
75.	Serah Terima dan Pisah Sambut Ka. Kanwil beserta Kepala Divisi Pemasyarakatan lama Bapak Imam Suyudi dan Marasidin Siregar, kepada Ka. Kanwil beserta Ka. Div Pemasyarakatan baru oleh Bapak Priyadi dan Taufiqyrahman di Aula Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	4 Maret 2019
76.	Pelepasan Kepala Kantor Wilayah lama dan Kepala Divisi Pemasyarakatan yang lama	4 Maret 2019
77.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel buka Kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Hotel di Hotel Continent Centre Point Makassar	4 Maret 2019
78.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel pimpin Apel Pagi Perdana di Kanwil	5 Maret 2019
79.	Pengarahan pada Apel Pagi di Lapas Kelas I Makassar	5 Maret 2019
80.	Pengarahan Perdana kepada seluruh pejabat struktural di Lapas Kelas I Makassar	5 Maret 2019
81.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel mengunjungi beberapa layanan di Lapas Kelas I Makassar	5 Maret 2019
82.	Kadiv Pemasyarakatan pimpin rapat di jajaran pemasyarakatan kanwil	5 Maret 2019
83.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sul Sel didampingi Ka. Bid Hukum dan Ka. Sub. Fasilitas Produk Hukum Daerah serta para Legal Drafter dan Calon Legal Drafter Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	5 Maret 2019
84.	Kepala Bidang Kakeswat Napi/Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Selaku Ketua Kegiatan menutup Kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Hotel Continent Centre Point Makassar	6 Maret 2019
85.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum lantik Notaris Pengganti di ruang Rapat Ka. Div Pelayanan Hukum	6 Maret 2019
86.	Kepala Kantor Wilayah kunjungi Rutan Kelas I Makassar	6 Maret 2019
87.	Tim Evaluasi PMPRB kunjungi Kantor Wilayah	6 Maret 2019
88.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel melakukan penguatan terhadap jajaran Divisi Pemasyarakatan	8 Maret 2019
89.	Kunjungan Kerja Ka. Kanwil tinjau alur kunjungan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	9 Maret 2019
90.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel dampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI buka Rakernis Pemasyarakatan T.A. di hotel Continent Centre Point Makassar	11 Maret 2019
91.	Pimpinan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Kakanwil harapkan peningkatan SDM	11 Maret 2019





NO	KEGIATAN	WAKTU
92.	ASN Kemenkum HAM Sul Sel ikuti Workshop Penggunaan Aplikasi CBHRIS dan E-Learning di Aula Kanwil	11 Maret 2019
93.	Ka. Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel hadir Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Makassar	12 Maret 2019
94.	Ka. Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel tutup kegiatan Rakernis Pemasarakatan di Hotel Continent Centre Point Makassar	12 Maret 2019
95.	Ka. Div Administrasi pimpin rapat bagian program dan Humas Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel terkait penting pelaksanaan tugas dan baik	13 Maret 2019
96.	Ka. Div Pemasarakatan buka Konsultasi Teknis Pemasarakatan dengan tema Optimalisasi Pembinaan Kepemimpinan Warga Binaan Pemasarakatan menwujudkan kegiatan industri pada Lapas/Rutan	13 Maret 2019
97.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel buka kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang di bawakan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bapak IR. Razilu di kanwil	18 Maret 2019
98.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel buka kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan di Hotel Four Point Makassar	19 Maret 2019
99.	Koordinasi Komisi Nasional HAM RI dengan seluruh Ka.UPT Lingkup Kanwil terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Aula Kanwil	19 Maret 2019
100.	Kepala Divisi Administrasi dampingi Staf Ahli Menteri Hukum dan Ham RI bidang ekonomi beri pemaparan Instrumen Pembinaan Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Menteri pada divisi administrasi Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	19 Maret 2019
101.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel Priyadi di damping oleh Kepala Divisi Administrasi Abd. Rahman L tinjau Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar.	19 Maret 2019
102.	Kunjungan Kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel Beri Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasarakatan di Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel Rutan Pangkep Barru dan Kanim Pare-pare	20 Maret 2019
103.	Kepala Bidang Pelayanan Hukum Lakukan Monev Pelayanan AHU Online Notaris Pinrang dan Pare Pare	22 Maret 2019
104.	Tim biro humas Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI, M.Ikmal Idrus. selanjutnya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan e-Lapor dikanwil Kemenkumham Sulsel sekaligus mensosialisasikan e-Lapor versi 3.0 di ruang rapat pimpinan	25 Maret 2019
105.	Pendampingan Tim Biro Humas Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI, M.Ikmal Idrus.terkait Aplikasi E-LAPOR di Kanim Pare Pare	26 Maret 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
106.	Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi,	26 Maret 2019
107.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan laksanakan kegiatan kerja bhakti dalam rangka menyambut hari bhakti masyarakatan ke-55 di mesjid Nurul Ilmi UNM Makassar	27 Maret 2019
108.	Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Amru Walid Batubara membuka kegiatan Penyelesaian Substantif Paten Dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Aula Kanwil	27 Maret 2019
109.	Kepala Divisi Administrasi Abdul Rahman mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan buka kegiatan konsultasi teknis masyarakatan pedoman program pembinaan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan tahun anggaran 2019 di Ballroom Khayangan Hotel Continent	27 Maret 2019
110.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Sulsel) bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) se-Kota Makassar hadir Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019 di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Kanim) Makassar	22 Maret 2019
111.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi lantik Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (PAW MPDN) Kota Makassar dan Notaris Kabupaten Maros dan Notaris Pengganti Kota Palopo.	28 Maret 2019
112.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi terima kunjungan dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Selatan bertempat di Ruang Kerja	28 Maret 2019
113.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Priyadi mengumpulkan jajaran admistrasi diruangan kerjanya untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan laporan kegiatan tugas pokok dan fungsi selama triwulan pertama.	28 Maret 2019
114.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM gelar sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Harmonisasi Peraturan Daerah, di ruang rapat pimpinan,	28 Maret 2019
115.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel menyelenggarakan pertemuan arisan rutin yang berlangsung Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus dan peserta arisan dharma wanita kanwil di Aula Kanwil	28 Maret 2019
116.	Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel buka kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Jabatan Fungsional Umum dan jabatan fungsional teknis divisi pelayanan hukum serta ibu dharma wanita pengayoman kanwil di Aula Kanwil (28/3/2019)	28 Maret 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
117.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, memberikan pelayanan pengaduan bagi masyarakat umum terkait pelanggaran HAM bertempat di ruang rapat pimpinan, bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel.	29 Maret 2019
118.	Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrahman, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel tutup kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Pedoman Program Pembinaan berdasarkan tingkat resiko dan Kebutuhan Tahun Anggaran 2019 di Ballroom Khayangan Hotel Continet.	29 Maret 2019
119.	Kunjungan Kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel tingkatkan kualitas pelayanan public, Kakanwil Sulsel berdialog dengan pengunjung di Lapas Narkotika Sungguminasa.	30 Maret 2019
120.	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Priyadi kumpul jajaran Humas Kanwil Sulsel diruang kerja Kalapas Narkotika Sungguminasa.	30 Maret 2019
	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Priyadi hadir pelepasan dan alih tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas IIa Sungguminasa.	30 Maret 2019

Sumber : Kanwil /UPT ,data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

**Tabel 3 Penyelenggaran Kehumasan**

NO.	KEGIATAN
1	Pembuatan Spanduk

Sumber : Kanwil /UPT , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

## 2. Bagian Umum

Keadaan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan disampaikan pada tabel berikut:



Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT/SATKER	JUMLAH PEGAWAI				JML	TINGKAT PENDIDIKAN									JML
		GOLONGAN					SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		IV	III	II	I											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kanwil	25	120	29	-	174	-	-	32	1	-	7	93	41	-	174
2	LP Makassar	9	71	67	-	147	-	-	79	-	-	9	47	12	-	147
3	LP Watampone	4	62	51	-	117	-	-	67	-	-	2	39	9	-	117
4	LP Pare-pare	2	28	38	-	68	-	-	44	-	-	-	20	4	-	68
5	LP Bulukumba	3	50	33	-	86	-	-	43	-	-	2	39	2	-	86
6	LP Narkotika	3	48	73	-	124	-	-	73	-	-	5	41	5	-	124
7	LP Maros	3	38	42	-	83	-	-	44	-	-	2	31	6	-	83
8	LP Palopo	2	42	39	-	83	-	-	54	-	-	2	25	2	-	83
9	Bapas Makassar	11	61	7	-	79	-	-	11	-	-	3	49	16	-	79
10	Bapas Watampone	2	41	10	-	53	-	-	16	-	-	-	34	3	-	53
11	Bapas Palopo	1	16	3	-	20	-	-	5	-	-	-	14	1	-	20
12	Rutan Makassar	6	96	78	-	180	-	-	96	-	-	2	73	9	-	180
13	Rutan Barru	2	19	20	-	41	-	-	22	-	-	-	16	3	-	41
14	Rutan Enrekang	-	20	16	-	36	-	-	25	-	-	1	8	2	-	36
15	Rutan Makale	1	16	19	-	36	-	-	29	-	-	-	6	1	-	36
16	Rutan Pangkajene	-	31	23	-	54	-	-	32	-	-	-	20	2	-	54
17	Rutan Pinrang	1	19	33	-	53	-	-	37	-	-	-	13	3	-	53
18	Rutan Sidrap	2	22	25	-	49	-	-	30	-	-	2	14	3	-	49
19	Rutan Watansoppeng	-	20	14	-	34	-	-	19	-	-	-	14	1	-	34
20	Rutan Jeneponto	1	26	19	1	47	-	-	29	-	-	-	14	4	-	47
21	Rutan Bantaeng	1	21	15	-	37	-	-	23	-	-	1	11	2	-	37
22	Rutan Selayar	-	25	27	1	53	-	-	37	-	-	1	15	-	-	53
23	Rutan Sinjai	-	28	17	-	45	-	-	28	-	-	1	13	3	-	45
24	Rutan Sengkang	1	24	27	-	52	-	-	29	-	-	-	19	4	-	52
25	Rutan Malino	1	12	9	-	22	-	-	11	1	-	-	8	2	-	22
26	Rutan Masamba	1	15	33	-	49	-	-	39	-	-	-	8	2	-	49
27	Rupbasan Makassar	1	23	13	-	37	-	-	17	-	-	4	12	4	-	37



## Laporan Triwulan I Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian

NO	UNIT/SATKER	JUMLAH PEGAWAI				JML	TINGKAT PENDIDIKAN									JML
		GOLONGAN					SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		IV	III	II	I											
28	Kanim Makassar	3	90	11	-	104	-	-	12	-	-	6	71	12	3	104
29	Rudenim Makassar	1	16	35	-	52	-	-	35	-	-	1	11	5	-	52
30	BHP Makassar	5	22	3	-	30	-	-	5	-	-	1	14	10	-	30
31	Lapas Takalar	4	47	45	-	96	-	-	51	-	-	1	40	4	-	96
32	Lapas Wanita Sungguminasa	1	33	49	-	83	-	-	51	-	-	1	29	2	-	83
33	Kanim Parepare	-	39	6	-	45	-	-	9	-	-	3	31	2	-	45
34	Kanim Palopo	-	30	4	-	34	-	-	1	-	-	-	30	3	-	34
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>	<b>1271</b>	<b>933</b>	<b>2</b>	<b>2303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1135</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>922</b>	<b>184</b>	<b>3</b>	<b>2303</b>

Sumber : Kanwil /UPT , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	UNIT/SATKER	PEJABAT ESELON										JABATAN KOSONG	JFT	JFU
		I		II		III		IV		V				
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kanwil Sulawesi Selatan	-	-	1	4	7	-	18	-	-	-	-	37	107
2	LP Makassar	-	-	-	1	-	5	-	9	-	-	2	9	121
3	Bapas Makassar	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	16	56
4	Rutan Makassar	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	11	159
5	Rutan Masamba	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	45
6	Rudenim Makassar	-	-	-	-	-	1	-	4	9	-	-	-	38
7	Rutan Sidrap Rappang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	43
8	LP Takalar	-	-	-	-	-	1	-	3	6	-	2	2	82
9	Rutan Sinjai	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	41
10	Bapas Palopo	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	11	5
11	LP Maros	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-	2	67
12	Rutan Sengkang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	46
13	LP Wanita Sungguminasa	-	-	-	-	1	-	4	-	8	-	1	2	67



## Laporan Triwulan I Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian

NO	UNIT/SATKER	PEJABAT ESELON										JABATAN KOSONG	JFT	JFU
		I		II		III		IV		V				
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Rutan Pangkajene	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	50
15	Rutan Pinrang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	47
16	Rutan Enrekang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	32
17	LP Bulukumba	-	-	-	-	1	-	6	-	8	-	-	4	67
18	LP Watampone	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	1	2	100
19	LP Anak Parepare	-	-	-	-	-	1	-	3	7	-	1	2	54
20	Rutan Selayar	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	48
21	Rutan Jeneponto	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	5	38
22	LP Palopo	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-	1	68
23	Rutan Watansopeng	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	30
24	Rutan Makale	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	31
25	Rupbasan Makassar	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	31
26	LP Narkotika Sungguminasa	-	-	-	-	1	-	5	-	6	-	-	3	109
27	Bapas Watampone	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	31	18
28	Rutan Bantaeng	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	32
29	Rutan Malino	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	18
30	Rutan Barru	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	36
31	BHP Makassar	-	-	-	-	1	5	4	-	3	-	1	1	15
32	Kanim Makassar	-	-	-	-	1	-	5	-	10	-	1	25	62
33	Kanim Parepare	-	-	-	-	-	1	-	4	9	-	-	12	19
34	Kanim Palopo	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	24	6
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>28</b>	<b>157</b>	-	<b>9</b>	<b>210</b>	<b>1788</b>

Sumber : Kanwil /UPT ,data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan



Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT/SATKER	JENIS KELAMIN				JML
		P	%	W	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanwil	100	57%	74	43%	174
2	LP Makassar	28	19.05%	119	80.95%	147
3	LP Watampone	94	80.35%	23	19.65%	117
4	LP Pare-pare	55	84.62%	13	19.13%	68
5	LP Bulukumba	76	88.4%	10	11.6%	86
6	LP Narkotika	111	89.50%	13	10.50%	124
7	LP Maros	74	89.02%	9	10.98%	83
8	LP Palopo	78	93.97%	5	6.03%	83
9	Bapas Makassar	51	64.55%	28	35.45%	79
10	Bapas Watampone	14	26%	39	74%	53
11	Bapas Palopo	13	65%	7	35%	20
12	Rutan Makassar	142	78.89%	38	21.11%	180
13	Rutan Barru	5	12.02%	36	87.8%	41
14	Rutan Enrekang	31	92%	5	8%	36
15	Rutan Makale	31	83.87%	5	16.13%	36
16	Rutan Pangkajene	46	85.18%	8	14.81%	54
17	Rutan Pinrang	46	87%	7	13%	53
18	Rutan Sidrap	44	89.80%	5	10.20%	49
19	Rutan Watansoppeng	28	82.35%	6	17.64%	34
20	Rutan Jeneponto	38	81%	9	19%	47
21	Rutan Bantaeng	32	86.5%	5	13.5%	37
22	Rutan Selayar	43	76.75%	10	23.25%	53
23	Rutan Sinjai	41	92.68%	4	7.32%	45
24	Rutan Sengkang	44	84.61%	8	15.39%	52
25	Rutan Malino	19	86.36%	3	13.64%	22
26	Rutan Masamba	40	81.64%	9	18.36%	49
27	Rupbasan Makassar	25	67.57%	11	32.43%	37



NO	UNIT/SATKER	JENIS KELAMIN				JML
		P	%	W	%	
1	2	3	4	5	6	7
28	Kanim Makassar	59	56.73%	45	43.27%	104
29	Rudenim Makassar	39	75%	13	25%	52
30	BHP Makassar	15	50%	15	50%	30
31	Lapas Takalar	85	89%	11	11%	96
32	Lapas Wanita Sungguminasa	24	28.91%	59	71.09%	83
33	Kanim Parepare	12	26.66%	33	73.33%	45
34	Kanim Palopo	31	91%	3	9%	34
<b>JUMLAH</b>		1614	70.08%	689	29.92%	2303

Sumber : Kanwil /UPT , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### Formasi

Formasi adalah penentu jumlah dan susunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya.

Jumlah kebutuhan pegawai Tahun 2019 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Jumlah kebutuhan pegawai

NO	UPT/ SATKER	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN PEGAWAI
1	2	3	4	3-4
1	Kanwil	184	174	10
2	LP Makassar	211	147	64
3	LP Watampone	137	117	20
4	LP Pare-pare	113	68	45
5	LP Bulukumba	110	86	22
6	LP Narkotika	174	124	50
7	LP Maros	132	83	50
8	LP Palopo	120	83	37
9	Bapas Makassar	89	79	10
10	Bapas Watampone	60	53	7
11	Bapas Palopo	50	20	30
12	Rutan Makassar	200	180	20
13	Rutan Barru	65	41	24
14	Rutan Enrekang	46	36	10
15	Rutan Makale	45	36	9





NO	UPT/ SATKER	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN PEGAWAI
16	Rutan Pangkajene	70	54	16
17	Rutan Pinrang	73	53	20
18	Rutan Sidrap	72	49	23
19	Rutan Watansoppeng	61	34	27
20	Rutan Jeneponto	57	47	10
21	Rutan Bantaeng	46	37	9
22	Rutan Selayar	55	53	2
23	Rutan Sinjai	85	45	40
24	Rutan Sengkang	72	52	20
25	Rutan Malino	45	22	23
26	Rutan Masamba	69	49	20
27	Rupbasan Makassar	40	37	3
28	Kanim Makassar	19	104	19
29	Rudenim Makassar	75	52	23
30	BHP Makassar	44	30	14
31	Lapas Takalar	115	96	19
32	Lapas Wanita Sungguminasa	103	83	20
33	Kanim Parepare	50	45	5
34	Kanim Palopo	44	34	10
<b>Total</b>		<b>3036</b>	<b>2303</b>	<b>731</b>

Sumber : Kanwil /UPT , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### 3. Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019

Pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Program Dukungan Manajemen dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sudah terlaksana dengan baik. Adapun Realisasi Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan, diuraikan dalam tabel 8 dan 8.1 sebagai berikut :



Tabel 8.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 115.409.171.000,-	Rp. 31.905.071.392,-	27,65
2	Belanja Barang	Rp. 131.487.880.000,-	Rp. 29.041.433,679,-	22,09
3	Belanja Modal	Rp. 24.549.243.000,-	Rp. 86.822.000,-	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 271.446.294.000,-</b>	<b>Rp. 61.033.327.071,-</b>	<b>22,48</b>

Sumber : Kanwil /UPT , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

**4. Laporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN)**

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

PNBP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan penerimaan PNBP selama Triwulan I Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 9 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

NO	SEKTOR PNBP	JUMLAH
1.	UPT Keimigrasian	Rp. 10,492,512,-
2.	UPT Pemasarakatan	Rp. 68,755,026,-
3.	BHP	Rp. 0,-
4.	Kantor Wilayah	Rp. 7,512,000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 86,759,538,-</b>

Sumber : Kanwil /UPT , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan



## 2. Divisi Pemasyarakatan

### 1. Pelayanan Tahanan

Dalam proses pra adjudikasi, seorang tahanan yang didakwa melakukan pelanggaran hukum, diperlakukan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penempatan seorang tahanan harus dipisahkan dengan orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Narapidana). Beberapa bangunan Lapas yang ada saat ini, selain berfungsi sebagai tempat pembinaan (LAPAS), juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan (Rutan). Kondisi yang demikian menyebabkan kondisi Lapas melebihi daya tampung (Over Kapasitas) penghuni dan tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

#### Keadaan Jumlah Penghuni NAPI/ Tahanan

Data Napi / Tahanan di Triwulan I Tahun 2019 pada tabel 10 berikut :

NO	UPT	KAP	NAPI		TAHANAN		JML NAPI/TAHANAN	% HUNIAN	% OVER KAPASITAS
			L	P	L	P			
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR	740	845	0	145	0	990	134	34
2	LAPAS KELAS II A BULUKUMBA	300	255	12	69	7	343	114	14
3	LAPAS KELAS II A MAROS	202	446	12	94	4	556	275	175
4	LAPAS KELAS II A PALOPO	314	625	27	124	2	778	248	148
5	LAPAS KELAS II A WATAMPONE	450	250	21	131	15	417	93	0
6	LAPAS KELAS II B TAKALAR	250	451	13	50	7	521	208	108
7	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA	368	990	0	8	0	998	271	171
8	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA	248	0	238	0	6	244	98	0
9	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PARE-PARE	360	440	30	56	2	528	147	47
10	RUTAN KELAS I MAKASSAR	1000	182	22	1790	170	2164	216	116
11	RUTAN KELAS II B BANTAENG	62	110	4	33	9	156	252	152
12	RUTAN KELAS II B BARRU	106	189	3	21	5	218	206	106
13	RUTAN KELAS II B ENREKANG	85	164	16	16	2	198	233	133
14	RUTAN KELAS II B JENEPONTO	44	74	4	70	2	150	341	241



NO	UPT	KAP	NAPI		TAHANAN		JML NAPI/TAHANAN	% HUNIAN	% OVER KAPASITAS
			L	P	L	P			
15	RUTAN KELAS II B MAKALE	47	91	5	79	4	179	381	281
16	RUTAN KELAS II B MALINO	50	48	0	3	0	51	102	2
17	RUTAN KELAS II B MASAMBA	225	222	11	106	5	344	153	53
18	RUTAN KELAS II B PANGKAJENE	123	282	11	59	1	353	287	187
19	RUTAN KELAS II B PINRANG	220	265	19	158	9	451	205	105
20	RUTAN KELAS II B SELAYAR	69	63	7	30	2	102	148	48
21	RUTAN KELAS II B SENKANG	200	196	12	127	11	346	173	73
22	RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG	140	280	9	80	13	382	273	173
23	RUTAN KELAS II B SINJAI	100	121	3	45	2	171	171	71
24	RUTAN KELAS II B WATANSOPPENG	62	110	5	29	6	150	242	142
<b>TOTAL</b>		<b>5765</b>	<b>6699</b>	<b>484</b>	<b>3323</b>	<b>284</b>	<b>10790</b>	<b>187</b>	<b>87</b>

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT)Pemasyarakatan , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

Ket : ■ Over kapasitas

## 2. Pembinaan Narapidana

Data Pemberian PB, CB dan CMB pada Lapas/ Rutan se-wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel 11 Data pemberian PB, CB dan CMB

NO	BULAN	PEMBERIAN HAK-HAK WBP			KET
		PB	CB	CMB	
1	2	3	4	5	
1	Januari	165	118	-	
2	Februari	90	75	-	
3	Maret	109	107	-	
<b>TOTAL</b>		<b>364</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Unit Pelaksana Teknis(UPT)Pemasyarakatan , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan



### 3. Pembinaan Klien

Keadaan klien Pemasyrakatan pada Bapas se-Sulawesi Selatan dirinci berdasarkan klasifikasinya pada tabel berikut:

Tabel 12 Keadaan klien Pemasyrakatan

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Anak yang diputus hakim untuk dipulangkan ke Orang Tua/ Wali	-	
2	Anak yang diputus Hakim menjadi Anak Negara (AN)	-	
3	Pidana Bersyarat	-	
4	Pembebasan Bersyarat (PB)	252	
5	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	158	
6	Cuti Bersyarat (CB)	128	
7	Litmas untuk Pengadilan Negeri	197	
8	Litmas untuk Pembinaan Luar Lapas	135	
9	Litmas untuk Pembinaan Dalam Lapas	688	
10	Sidang Anak Pengadilan Negeri	42	
11	Anak Asuhan	-	
12	Asimilasi	2	
<b>TOTAL</b>		<b>1.602</b>	

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyrakatan , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### 4. Perawatan Basan/ Barang

Untuk kepentingan proses peradilan, barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan disita dan disimpan di Rupbasan.(Terlampir).



### 3. Divisi Imigrasi

#### 1. Pelayanan SPRI

Data pelayanan, pemberian SPRI dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk WNI dan WNA sebagai berikut:

- a. Pemberian Paspor RI 48 halaman  
Jenis Paspor ini untuk keperluan ke luar negeri tidak untuk bekerja. Selama Triwulan I Tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak **34.517** Paspor periode Januari s.d Maret.
- b. Pemberian Paspor RI 24 halaman  
Jenis paspor ini untuk keperluan keluar negeri dalam rangka bekerja. Jenis Paspor ini dipergunakan para TKI untuk bekerja ke Malaysia. selama Triwulan I Tahun 2019 telah dikeluarkan sebanyak **244** Paspor periode Januari s.d Maret.

**Tabel 13 Pemberian Paspor RI**

NO	UNIT/SATKER	PASPOR		KET.
		24 HALAMAN	48 HALAMAN	
1.	Imigrasi Kelas I TPI Makassar	100	20.891	-
2.	Imigrasi Kelas II TPI Parepare	112	9.004	-
3.	Imigrasi Kelas III Palopo	32	4.622	-
<b>JUMLAH</b>		<b>244</b>	<b>34.517</b>	-

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

#### 2. Pelayanan ITAS/ITAP

Selama Triwulan I Tahun 2019 periode Januari s.d Maret. Pelayanan Warga Negara Asing dari berbagai kebangsaan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo dengan data pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 14 Pelayanan ITAS/ITAP**

NO	UNIT/SATKER	BULAN	PELAYANAN					KET.
			ITK	ITAS	PERPANJANG ITAS	ITAP	PERPANJANG ITAP	
1.	Imigrasi Kelas I TPI Makassar	Januari s.d Maret	393	79	77	3	2	-
2.	Imigrasi Kelas II TPI Parepare	Januari s.d Maret	21	6	8	-	-	-
3.	Imigrasi Kelas III Palopo	Januari s.d Maret	34	91	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>448</b>	<b>176</b>	<b>85</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan



### 3. Lalulintas Orang Asing

Data lalu lintas orang (WNI dan WNA) dari dan ke luar negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut dan udara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia  
Lalu lintas WNI dari dan ke luar negeri melalui Laut/ Udara sebanyak **39.610** orang.
- b. Warga Negara Asing  
Lalu lintas WNA dari dan ke luar negeri melalui Laut/ Udara sebanyak **7.317** orang.

**Tabel 15 Data Lalu Lintas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)**

Kegiatan	Tahun 2019	
	Makassar	Pare-Pare
<b>KAPAL</b>	-	-
Kapal Datang		
- Crew WNI	532	57
- Crew WNA	1.184	96
- Penumpang WNI	-	-
- Penumpang WNA	-	-
Kapal Berangkat		
- Crew WNI	570	56
- Crew WNA	1178	95
- Penumpang WNI	-	-
- Penumpang WNA	-	-
<b>PESAWAT</b>		
Pesawat Datang		
- Crew WNI	243	-
- Crew WNA	221	-
- Penumpang WNI	21.599	-
- Penumpang WNA	2.151	-
Pesawat Berangkat		
- Crew WNI	240	-
- Crew WNA	215	-
- Penumpang WNI	16.313	-
- Penumpang WNA	2.177	-
PLB / BCC	-	-
Crew Pas / CCC	-	-

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

#### c. Pengawasan

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian selama Triwulan I Tahun 2019, telah dilakukan pedetensian pemindahan, pemulangan/pengungsian/pendeportasian Warga Negara Asing dari berbagai kebangsaan Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2019 sebanyak 45 orang (Januari), 29 orang (Februari), 44 orang (Maret) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 16 Pengungsi di Dalam Rudenim

NO.	STATUS	ASAL NEGARA DETENI	Januari		Februari		Maret	
			L	P	L	P	L	P
1.	Pedetensian	Afganistan	6	-	6	-	1	-
		Sudan	4	-	4	-	-	-
		Somalia	4	2	4	2	4	-
		Nyanmar	2	-	2	-	2	-
		Iran	-	-	1	-	1	-
		Thailand	1	-	1	-	1	-
		Palestine	1	-	1	-	1	-
		Philipina	1	-	1	-	1	-
2.	Pemindahan	Afganistan	1	-	1	3	4	5
		Srilanka	1	2	-	-	-	-
		Ethiopia	1	-	-	-	1	-
		Somalia	9	7	1	2	3	9
		Sudan	-	-	-	-	6	-
		Yaman	-	-	-	-	3	-
3.	Pendeportasian	Somalia	3	-	-	-	-	2
<b>Total</b>			<b>34</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>16</b>

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tabel 17 Pengungsi di luar Rudenim

No.	Nama Penginapan	Nama Negara Asal												Total	
		Afg	Mmr	Irn	Som	Sdn	Irq	Lka	Eth	Pak	Pse	Yem	Eri		Egy
1	KANIM Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IDC Makassar	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
3	Police Custody	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Bugis House	97	2	3	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	121
5	Kirani Guesthouse	78	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	82
6	Ida Guesthouse 1	16	2	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	23
7	Ida Guesthouse 2	45	-	1	18	5	-	-	1	-	-	-	-	-	70
8	155 Guesthouse A	36	-	1	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	44
9	155 Guesthouse B	48	6	-	1	4	-	-	-	7	-	-	-	-	66
10	155 Guesthouse C	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
11	155 Guesthouse D	74	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	80
12	Pondok Elite A	40	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	46
13	Pondok Elite B	49	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
14	Pondok Nugraha	89	3	6	20	19	14	-	3	-	-	-	1	-	155





No.	Nama Penginapan	Nama Negara Asal												Total	
		Afg	Mmr	Irn	Som	Sdn	Irq	Lka	Eth	Pak	Pse	Yem	Eri		Egy
15	Pondok Re - Re	101	21	3	13	9	3	-	1	16	-	1	-	1	169
16	Pondok Reski Jaya	68	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	72
17	Wisma Budi	-	30	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	35
18	D'Win Homestay	1	-	2	13	4	-	-	2	-	-	-	-	-	22
19	Wisma Favorite	35	11	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	51
20	Wisma KPI	84	14	2	15	2	4	3	-	1	7	-	-	-	132
21	Wisma Mustika 1	20	13	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	40
22	Wisma Mustika 2	34	-	5	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	47
23	Wisma Mustika 3	44	11	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	69
24	Wisma Maysara	100	15	5	6	2	9	-	3	5	-	-	-	-	145
25	Wisma MSM	11	20	6	10	1	5	12	4	-	-	-	-	-	69
26	Wisma Marindi	23	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
27	Wisma D-Khanza	25	22	4	4	2	-	-	5	-	-	-	-	-	62
28	Wisma Baji rupa	36	21	2	13	-	11	-	-	-	-	2	-	-	85
29	Pondok Maryam	15	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Total	1197	198	51	154	68	47	28	25	42	8	5	1	1	1.825

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan.

## D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

### 1. Pelayanan Kewarganegaraan

Pelayanan kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2019.

- Tahun 2019 : - orang

**Tabel 18. Jenis Pelayanan Kewarganegaraan**

NO	JENIS	PERMOHONAN	PNBP	KET.
		NIHIL	-	

Sumber :DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### 2. Pelayanan HKI

Dapat dilihat jumlah permohonan di bidang HKI masing-masing pada tabel berikut:

**Tabel 19. Permohonan HKI**

NO	JENIS	PERMOHONAN
1.	Merk	47
2.	Hak Cipta	21
3.	Paten	6
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>

Sumber :DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan



### 3. Pemberian Bantuan Hukum

**Tabel. 20 Pemberian Bantuan Hukum**

NO	JENIS BANTUAN HUKUM	PERMOHONAN/KASUS	REALISASI
1.	Bantuan Hukum Litigasi	NIIHIL	
2.	Bantuan Hukum Non Litigasi		

Sumber :DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### 4. Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum

Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tabel berikut :

**Tabel 21 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum**

NO	MATERI	NARASUMBER	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
1.	UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Feni Feliana	Takalar	14-02-2019
2.	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu	Muh. Safri T	Takalar	14-02-2019
3.	Hak Asasi Manusia	Amru Walid B	Kanwil	28-03-2019
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Abd. Rahman L	Kanwil	28-03-2019

Sumber :DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### 5. Dokumentasi dan Informasi Hukum (DIH)

**Tabel 22 Jumlah Pengunjung dan Buku yang Dipinjam**

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG	JUMLAH BUKU YANG DIPINJAMKAN	Jumlah Total Seluruh Buku yang Ada
1.	Januari	5 Orang	5 Buku	4.434
2.	Februari	16 Orang	5 Buku	
3.	Maret	16 Orang	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>37 Orang</b>	<b>10 Buku</b>	

Sumber :DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

### 6. Legislasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berkoordinasi melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam pembahasan Ranperda dan agar setiap Perda maupun Ranperda dikirim ke Kantor Wilayah.



Tabel 23 Data Perda Ranperda yang Dibahas

NO	NAMA KABUPATEN	NOMOR DAN TENTANG	KET
1.	Enrekang	1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Telah diharmonisasi (25 Januari 2019)
		2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Enrekang.	Telah diharmonisasi (25 Januari 2019)
		3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	Telah diharmonisasi (25 Januari 2019)
		4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Telah diharmonisasi (25 Januari 2019)
2.	Bantaeng	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2023.	Telah diharmonisasi (25 Januari 2019)
		2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2038.	Telah diharmonisasi (25 Januari 2019)
3.	Wajo	1. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.	Telah diharmonisasi (12 Februari 2019)
		2. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang.	Telah diharmonisasi (12 Februari 2019)
4.	Luwu Timur	Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	Telah diharmonisasi (20 Februari 2019)



NO	NAMA KABUPATEN	NOMOR DAN TENTANG	KET
5.	Toraja Utara	1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tera/ Tera Ulang.	Telah diharmonisasi (25 Februari 2019)  Telah diharmonisasi (25 Februari 2019)

Sumber :DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM, data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan

## 7. RANHAM

Dalam rangka pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMMAS), Kantor Wilayah telah menerima Laporan Komunikasi maupun informasi serta permohonan bantuan hukum dari instansi terkait (mitra kerja) maupun dari masyarakat sebanyak 10 kasus pada tabel berikut :

Tabel 24 Data Laporan Komunikasi maupun Informasi

NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Dugaan Pelanggaran HAM Terkait Konflik Pendirian Yayasan Di Masjid Nurul Jihad Yang Terjadi Antara Warga Kompleks IDI Dengan Sdr. Amiruddin, SH.	Koordinasi kepada pengurus Yayasan dan pemerintah setempat	2	-Telaahan (11 Februari 2019) -Koordinasi Langsung (15 Februari 2019)
2	Dugaan Pelanggaran HAM Terkait Sengketa Lahan Yang Terjadi Antara Sdr. Hajrah Aslam Dengan Universitas Islam Negeri (UIN).	Klarifikasi Surat	2	-Telaahan (11 Februari 2019) -Klarifikasi Langsung (12 Februari 2019)
3	Permohonan Bantuan Penyelesaian Secara Prosedur Hukum Dengan Management PT Verena Multi Finance.	Rapat Koordinasi	2	-Telaahan (11 Februari 2019) -Rapat Koordinasi (29 Maret 2019)



NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
4	Permohonan Bantuan Mediasi Terkait Status Tanah Bapas Kelas I Makassar.	Koordinasi langsung dan Rapat Koordinasi	3	-Telaahan (06 November 2018) -Koordinasi ke Bapas (06 Februari 2019) -Rapat Koordinasi (29 Maret 2019)
5	Sengketa Lahan Yang Terjadi Antara Yayasan Legiun Veteran RI Markas Cabang Kabupaten Gowa Dengan PT. GMTD.	Telaahan	1	-Telaahan (15 Maret 2019)
6	Dugaan Pelanggaran HAM, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Sdr. Nurmia Yuanita Dan Anaknya Bernama Naulia.	Rapat Koordinasi	2	-Telaahan (15 Maret 2019) -Rapat Koordinasi (29 Maret 2019)
7	Kasus Keberatan Warga Atas Kegiatan Yayasan Masjid Nurul Mu'minin Jalan Teuku Umar Raya No.8 (Penyampaian Komunikasi: Andi Ismail).	Klarifikasi Surat	2	-Telaahan (15 Maret 2019) -Klarifikasi Surat untuk Informasi kepada Pelapor (15 Maret 2019)
8	Permohonan Tindak Lanjut (Kepastian Hukum) Penanganan Kasus Pemalsuan Data Sdr. Ahmad Arianto Di Polres Maros.	Klarifikasi Surat	2	-Telaahan (15 Maret 2019) -Klarifikasi Surat untuk Informasi kepada Polres Maros (15 Maret 2019)
9	Tuntutan Pembayaran Pesangon Ex. Karyawan PT. Pertamina UPPDN VII Depot Pare-Pare Sulawesi Selatan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	Klarifikasi Langsung	2	-Telaahan (15 Maret 2019) -Klarifikasi langsung ke pihak-pihak terkait di Pare-pare (dijadwalkan 10 April 2019)
10	Permohonan Kepastian Mengenai Tindak Lanjut Permohonan Pwngalihan Hak Atas Tanah Dengan Sertifikat Hak Milik Yang Diajukan Sdr. Mei Tjoe Di Kantor Pertanahan Kota Makassar.	Rapat Koordinasi	2	-Telaahan (15 Maret 2019) -Rapat Koordinasi (29 Maret 2019)

Sumber :DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan



### 8. Kajian Permasalahan Hukum dan HAM

Tabel 25 Kajian Permasalahan Hukum dan HAM

NO.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Ket
	NIHIL	NIHIL	

### 9. Kenotariatan dan PPNS

Sampai dengan saat ini jumlah Notaris se Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak **451** orang. Dan dalam rangka pembinaan Notaris masih terbatas karena masih minimnya anggaran yang tersedia.

Tabel 26 Daftar Jumlah Notaris Di Wilayah Sulawesi Selatan

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Notaris
1	Kab. Barru	4
2	Kab. Bantaeng	4
3	Kab. Wajo	10
4	Kab. Gowa	73
5	Kab. Bulukumba	5
6	Kab. Sidrap	11
7	Kab. Pangkep	14
8	Kota Makassar	150
9	Kab. Enrekang	3
10	Kota Palopo	16
11	Kab. Luwu Timur	3
12	Kota Parepare	21
13	Kab. Sinjai	3
14	Kab. Jeneponto	2
15	Kab. Soppeng	4
16	Kab. Luwu utara	2
17	Kab. Bone	23
18	Kab. Toraja Utara	3
19	Kab. Tana Toraja	2
20	Kab. Luwu	5
21	Kab. Maros	53
22	Kab. Pinrang	13
23	Kab. Selayar	2
24	Kab. Takalar	25
<b>Jumlah</b>		<b>451 orang</b>



**Tabel 27 Data Notaris**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Notaris Baru	4
2.	Notaris Pindahan dari luar Sulawesi Selatan	-
3.	Notaris Pengganti	2

Sumber : *DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan*

**Tabel 28. Pelantikan Notaris**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pelantikan Notaris Baru	4 Orang (Maret 2019)
2.	Pelantikan Notaris Pengganti	2 Orang (Maret 2019)

Sumber : *DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM , data diolah oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan*



## 6. MASALAH

### A. Divisi Administrasi

1. **Bagian Program dan Hubungan Masyarakat**
  - Terbatasnya anggaran perjalanan dinas kehumasan dan peralatan (kamera, laptop) perlu peremajaan
  - Perlu peningkatan SDM, khususnya dan hal keprotokolan dan peliputan/ jurnalis.
2. **Bagian Umum**
  - Terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan pembinaan pegawai dan rekonsiliasi di bidang keuangan secara internal dan eksternal
  - Kurangnya sarana prasarana
  - Terdapat Tanah bangunan milik Kantor Wilayah terletak di Kab. Bulukumba, sehingga subbid Keuangan mengalami kesulitan berhubung lokasinya jauh dari kota Makassar
  - Melakukan penghapusan barang inventaris di bawah 100 juta rupiah tetapi salah satu syarat PSP barang tersebut nilai perolehannya berbeda dengan nilai yang tercantum dalam SK PSP
  - Kantor Wilayah memiliki beberapa rumah dinas yang masih di tempati oleh keluarga pegawai yang telah pensiun.

### B. Divisi Pemasyarakatan

1. **Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi**
  - Kurangnya kelengkapan berkas dalam proses pencabutan PB, CB dari Bapas sehingga pelaksanaan sidang TPP tertunda.
  - Perlu penambahan SDM untuk pengelolaan SDP.
  - Terbatasnya anggaran untuk pemindahan Narapidana/ Tahanan.
  - Unit layanan informasi masih terkendala dengan sarana dan prasarana.
2. **Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan/Baran dan Keamanan**
  - Tidak ada anggaran untuk sub bidang perawatan kesehatan untuk melakukan monitoring di UPT.





### C. Divisi Imigrasi

1. **Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian** - Pelaksanaan Bimdal berjalan optimal, permasalahannya di Kantor Imigrasi Kelas III Palopo terbatasnya sarana dan prasarana karena belum dihibahkannya gedung kantor oleh Pemkot Palopo, status pinjam pakai.
2. **Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian** - Belum adanya SOP yang mengatur prosedur pengumpulan informasi intelijen yang harus dilakukan. Petugas imigrasi dilapangan masih terkendala dengan aturan hukum yang menjadi dasar melakukan operasi intelijen.

### D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. **Bidang HAM**
  - Keterbatasan Perlengkapan Operasional Kantor
  - Keterbatasan Anggaran
  - Penyelenggaraan kegiatan di Subbidang P3 Hukum dan HAM terlambat karena menunggu petunjuk teknis dari Balitbang yang terkadang tidak tepat waktu.
2. **Bidang Pelayanan Hukum**
  - Keterbatasan ruangan sehingga Kasubbid Pelayanan AHU tidak memiliki ruangan tersendiri dan harus berbagi tempat dengan Kasubbid KI.
  - Koneksi internet tidak stabil sehingga mempengaruhi pelayanan.
  - Terdapat kegiatan yang tidak didukung dalam DIPA KI (kegiatan inventarisir potensi desain industri dalam rangka penyusunan database potensi di Target Kinerja).
3. **Bidang Hukum** - Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengharmonisasian produk hukum daerahnya di Kantor Wilayah.



## 7. PEMECAHAN MASALAH

### A. Divisi Administrasi

- Akan dilakukan penambahan anggaran perjalanan dinas kehumasan tahun 2019 melalui revisi POK.
- Akan menghadirkan protocol Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka peningkatan sdm.
- Agar tanah bangunan Kantor Wilayah yang terletak di kab. Bulukumba dapat di transfer keluar ke Lapas Bulukumba.
- Akan segera membuat usulan ralat PSP atas barang-barang yang nilainya berbeda
- Berhubung pihak Kantor Wilayah telah bersurat beberapa kali dan tidak ditanggapi, maka kami akan segera bersurat ke Biro Pengelolaan BMN untuk minta petunjuk selanjutnya, terkait rumah dinas.

### B. Divisi Pemasyarakatan

- Perlu di tingkatkan komunikasi antara operator ke Bapas terkait kelengkapan berkas PB dan CB
- Perlu peningkatann operator SDP di Kanwil dan UPT
- Melaksanakan kegiatan pemindahan Narapidana/ Tahanan antar wilayah harus sesuai dengan Kalender Kerja
- Perlunya penambahan sarana dan prasarana
- Dengan ketersediaan anggaran dapat melakukan pembinaan di UPT dan dapat memberdayakan tenaga medis yang ada di Makassar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, kepada WBP secara berkala.

### C. Divisi Imigrasi

- Perlu adanya prioritas alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana kantor, dan pelatihan peningkatan kualitas SDM.
- Dengan adanya SOP, maka prosedur pengumpulan informasi intelijen dapat terukur sehingga dapat bekerja secara maksimal dan sesuai aturan hukum yang menjadi dasar melakukan operasi intelijen.

### D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Melakukan koordinasi dan kerjasama secara terus-menerus dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Perlunya mengganti jasa internet
- Diharapkan dukungan yang memadai dalam DIPA agar kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal dan sarana prasarana yang lebih memadai.
- Koordinasi dengan Balitbang perlu lebih ditingkatkan lagi agar petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan di wilayah dapat diberikan tepat waktu.



## 8. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan selama Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

Pelaksanaan tugas pada Divisi Administrasi meliputi : Program dan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Pengurusan Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sudah berjalan dengan baik.

2. Divisi Pemasyarakatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

3. Divisi Imigrasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Imigrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Tugas-tugas dan kegiatan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang disediakan dalam DIPA tahun 2019.

### B. SARAN

1. Divisi Administrasi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Administrasi perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional khususnya dalam hal keprotokolan dan Peliputan/ Jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Divisi Pemasyarakatan

Dalam Tugas dan fungsi Pemasyarakatan perlu penambahan operator, dan sumber daya anggaran yang memadai, serta pelaksanaan pemindahan Narapidana/ Tahanan harus sesuai dengan Kalender Kerja.

3. Divisi Imigrasi

Divisi Imigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi melayani dan mengawasi lalu lintas Orang Asing dari dan keluar Indonesia perlu di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berwawasan luas, menguasai bahasa Asing, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.



4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM perlu adanya sarana dan prasarana, serta melakukan koordinasi dan kerjasama secara terus menerus dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Demikian kami sampaikan Laporan Triwulan I Tahun 2019 dan atas perkenaanannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Priyadi

NIP. 196308111987031001



# *Lampiran*